



RILIS

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT EVALUASI SELEKSI PENERIMAAN CPNS DAN PPPK TAHUN 2023
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023 - 2024
KE KANREG I BKN YOGYAKARTA
TANGGAL 6 – 8 MARET 2024**

Pada hari Rabu tanggal 06 maret 2024 Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Spesifik (Kunspek) Penerimaan CASN 2024 ke Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta. Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Dr. Syamsurizal, SE, MM diterima oleh Deputy Bidang Mutasi BKN RI Drs. Aris Windiyanto, MSi didampingi Kepala Kantor Regional I BKN Drs. Paulus Dwi Laksono, MAP. Selain itu juga dihadiri oleh Plt Deputy SDM dan Aparatur Kemenpan & RB Aba Subagja, S.Sos, MAP dan Kepala Badan Kepegawain Daerah (BKD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam sambutannya Deputy Mutasi BKN Aris Windiyanto menjelaskan progress penerimaan CASN terakhir, dimana sekarang masih dalam tahap pemberian nomer induk CPNS dan PPPK. Proses ini merupakan proses akhir setelah dilakukan berberapa tahapan seperti tes CAT, dan uji kompetensi pada akhir tahun 2023.

Sementara itu, ketua tim Kunspek Dr. Syamsurizal, SE, MM. menegaskan kembali perlunya pemerintah dapat menjelaskan penyebab terjadinya adanya perbedaan jumlah formasi yang diminta oleh daerah dengan formasi yang diterima. Selanjutnya perlu dijelaskan mengapa kasus perjokian masih terjadi. Sebagaimana telah diketahui bahwa perjokian ternyata telah terjadi di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Lampung.

Dalam penjelasannya, Kepala Kanreg I BKN Drs Paulus Dwi Laksono, MAP, menjelaskan bahwa kasus perjokian tidak terjadi di wilayah tugas Kantor Regional I BKN yang meliputi DIY dan Jawa Tengah. Agar perjokian tidak terjadi, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebenarnya telah menyediakan fasilitas *face recognition*. Dimana *face recognition* dilakukan dalam dua tahap, yakni ketika peserta tes akan masuk ruangan, dan manakala peserta membuka personal computer (PC). Lebih dari itu, Paulus menuturkan bahwa panitia seleksi juga telah menyiapkan peralatan *make up* untuk para peserta perempuan. Karena kadang *make up* juga menyebabkan gagalnya *face recognition*. Menurut laman Universitas Bina Nusantara, *Face recognition* sebuah teknologi yang mampu untuk

mengidentifikasi dan mengkonfirmasi identitas seseorang menggunakan wajah mereka. *Face recognition* menjadi salah satu sistem identifikasi biometrik yang paling baik dalam mengidentifikasi seseorang dengan fitur-fitur khusus pada tubuh maupun DNA yang menjadi pembeda antara satu orang dengan orang lainnya. Sementara itu, menurut Menurut US Government Accountability Office, ada 4 komponen yang dibutuhkan untuk melakukan *face recognition*, yaitu: kamera, *faceprint*, *Database* dan terakhir *Algoritme* untuk membandingkan *faceprint* dari wajah target dengan *faceprint* dalam *database*.

Terkait belum sinkronnya kebutuhan jumlah formasi antara pusat dan daerah. BKN menjelaskan bahwa sebenarnya telah ada sistem teknologi informasi yang menyediakan layanan untuk memudahkan pengajuan formasi antar instansi, yakni melalui *web site* SIASN Integrasi. Namun demikian BKN juga menyadari bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu ditingkatkan kembali. Agar peristiwa tertundanya pendaftaran penerimaan CASN 2023 yang telah lalu karena persoalan verifikasi dan validasi tidak terulang. Sebagaimana telah diberitakan oleh media massa di akhir tahun 2023, penyebab tertundanya pendaftaran penerimaan CASN 2023 karena belum tuntasnya koordinasi antara Kementerian/Lembaga.

Di akhir kunjungan, Ketua Tim Kunspek Dr. Syamsurizal, SE. MM, menekankan kembali bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu dan paruh waktu harus tuntas sebelum Desember 2024 sebagaimana pesan UU NO 20 tahun 2023 tentang ASN. Untuk itu dalam waktu dekat Komisi II DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian PAN & RB untuk membicarakan Rencana Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN. Dimana RPP Manajemen ASN akan memberikan jalan bagi tata kelola ASN kedepan. Termasuk menuntaskan persoalan 2, 3 juta tenaga honorer di tanah air, sehingga dapat selesai di masa akhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kota Yogyakarta, 6 Maret 2024,
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI
ke Kantor Regional I BKN Yogyakarta.